

**PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS KOTAK PENAGIHAN UNTUK  
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*DI KSPPS MUAMALAH BERKAH  
SEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MEGA INGGAWATI**

**NIM: G04214018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2018**

**PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS KOTAK PENAGIHAN UNTUK  
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*DI KSPPS MUAMALAH BERKAH  
SEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ekonomi Syariah**

**Oleh :  
MEGA INGGAWATI  
NIM : G04214018**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mega Inggawati

NIM : G04214018

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan untuk  
Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Syariah Muamalah  
Berkah Sejahtera ( MBS) Cipta Menanggal Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan  
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 31. Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mega Inggawati

NIM. G04214018

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mega Inggawati NIM. G04214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya , 31 Januari 2018

Pembimbing



**Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I**  
NIP. 19700514200003101

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mega Inggawati NIM. G04214018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 19700514200003101

Penguji II



Dr. Muhammad Ahsan, MM  
NIP. 196806212007011030

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI  
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE., M.Si  
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Inggawati  
NIM : G04214018  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah  
E-mail address : megaokt0710@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan Untuk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Februari 2018

Penulis

( Mega Inggawati )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan Untuk Pembiayaan *Murabahah* diKSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ( MBS) Cipta Menanggal Surabaya**” ini merupakan penelitian secara kualitatif yang menjawab pertanyaan dari penggunaan kotak penagihan dalam pembiayaan *murabahah* serta tingkat efektivitas dalam mengendalikan risiko pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi terhadap karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, sebelum memberikan kotak kepada anggota, koperasi melakukan identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Setelah itu koperasi menjelaskan penggunaan kotak penagihan yaitu dengan melakukan mediasi dan memberikan surat perjanjian yang berisi bersedianya anggota menerima kotak penagihan, jumlah yang wajib dimasukkan ke dalam kotak, dan tanggal pengambilan kotak.

Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah*, melakukan *retention* (menahan risiko) artinya koperasi mampu mengelola risiko yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain. Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 rasio pembiayaan berisiko tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan data penggunaan kotak penagihan dari bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017 tercatat mencapai 3,79%.

Diharapkan untuk ke depannya penggunaan kotak penagihan terus berkembang dan dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci: *manajemen risiko; pembiayaan murabahah; penggunaan kotak penagihan; risiko pembiayaan*



## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN .....
	1
	A. Latar Belakang.....
	1
	B. Identifikasi Masalah.....
	7
	C. Batasan Masalah .....
	8
	D. Rumusan Masalah .....
	8
	E. Kajian Pustaka.....
	9
	F. Tujuan Penelitian .....
	13
	G. Kegunaan Penelitian .....
	14
	H. Definisi Operasional.....
	15
	I. Metode Penelitian .....
	16
	J. Sistematika Pembahasan.....
	20
BAB II	PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DAN MANAJEMEN
	RISIKO.....
	22
	A. Pembiayaan .....
	22
	1. Pengertian Pembiayaan.....
	22
	2. Fungsi Pembiayaan .....
	23
	3. Jenis-Jenis Pembiayaan.....
	24
	4. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah .....
	26









## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah .....	34
3.1 Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera .....	48
3.2 Model Kotak Penagihan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera .....	59
3.3 Presentase Pembiayaan Bermasalah (Risiko pembiayaan) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2011-2016 .....	65
3.4 Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017-Juni 2017 Sebelum Menggunakan Kotak Penagihan .....	68
3.5 Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Juli 2017-Desember 2017 Setelah Menggunakan Kotak Penagihan .....	70
4.1 Pengelolaan Risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera .....	73
4.2 Proses Manajemen Risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada Kota Penagihan .....	75
4.3 Teknisi Penggunaan Kotak Penagihan .....	76
4.4 Skema Pengelolaan Risiko .....	80
4.5 Pengelolaan Risiko Dengan Cara <i>Retention</i> di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera	81
4.6 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kotak Penagihan Dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2017 .....	82



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan sebuah institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan sebuah institusi lembaga keuangan. Institusi lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kemudian dibagi menjadi dua prinsip dasar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat ditandai dengan penggunaan sistem bunga, yang menjadi cara lembaga untuk mendapatkan keuntungan profitabilitas maksimal. Sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan tidak mengenal sistem bunga (*riba*) melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah terdiri atas perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank. Jenis lembaga keuangan syariah non bank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, BMT (Baitul Māl Wa Al Tamwīl), dan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 79.





































- b. Data sekunder yang digunakan bersumber pada buku-buku literatur, artikel jurnal, dan data anggota dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang diberikan kotak penagihan oleh pihak koperasi.

### 3. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan laporan keuangannya.
2. Sekretaris KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai awal mula adanya model manajemen risiko yaitu menggunakan kotak penagihan dalam pembiayaan *murabahah*.
3. Manager KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai kualifikasi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.
4. Marketing KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai taknisi penggunaan kotak penagihan kepada anggota koperasi.

b. Objek

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* dan tingkat efektifitas dalam mengurangi tingkat risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.







Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran dari peneliti bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di Cipta Menanggal Surabaya dan terkait dengan penggunaan kotak penagihan yang jadi permasalahan yang diteliti, selain itu sebagai bahan pertimbangan dan masukan.

## PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DAN MANAJEMEN RISIKO

## 1. Pengertian Pembiayaan

Dalam SOP KJKS dan UJKS, pembiayaan diartikan sebagai berikut:

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan

<sup>33</sup>Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)”, *Iqtishadia*, Vol. 9, No.2 (2016), 403.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mendapatkan dana dalam meningkatkan usahanya. Yang disebut masyarakat bisa individu,

[illegible]





- sektor jasa, dan sektor perumahan.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan terdiri dari:<sup>38</sup>
1. Pembiayaan dengan jaminan, seperti jaminan benda berwujud (tanah, gedung, sebagainya), dan jaminan benda tidak berwujud (saham, dan surat berharga lainnya).
  2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan memiliki risiko tinggi karena tidak ada pengamanan dari lembaga apabila terjadi wanprestasi.

jaminan benda berwujud (tanah, gedung, sebagainya), dan jaminan benda tidak berwujud (saham, dan surat berharga lainnya).

2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan memiliki risiko tinggi karena tidak ada pengamanan dari lembaga apabila terjadi wanprestasi.



a. Akad Tabarru' (*gratuitous contract*)

b. Akad Tijarah (*compensational contract*)

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for transaction profit* (mencari keuntungan). Jadi tujuan utama

<sup>42</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 13-15.







d. Menurut Monzer Kahf *murabahah* “sebagai perjanjian jual beli dengan kewajiban bagi penjual untuk menyebutkan modal dan keuntungan yang ia inginkan.”<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *murabahah* suatu kegiatan jual beli yang di mana harga beli ditambah margin keuntungan sama dengan harga jual, dan harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam melakukan pembiayaan *murābahah*, ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah maupun nasabah saat melakukan pembiayaan *murābahah*. Rukun *murābahah* ada 5 yaitu:<sup>54</sup>

- Penjual (*bai'*)
- Pembeli (*musytari'*)
- Barang/obyek (*mabi'*)
- Harga (*tsaman*)
- Ijab qabul (*sighat*)

Sedangkan secara singkat syarat-syarat pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

<sup>53</sup>Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Se Kabupaten Demak”, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 259.

<sup>54</sup>Ibid., 71.





- a. Pembeli (nasabah) harus mengetahui harga-harga yang terkait barang tersebut, seperti harga asli barang, laba, dan total harga setelah ditambah biaya-biaya lainnya.
- b. Apa yang dijual adalah barang yang harus dibayar dengan uang.
- c. Barang yang dijual harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini pembeli membayar uang muka dan nominalnya telah ditentukan dan telah disepakati antara lembaga dengan nasabah.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 140-141.

[illegible]

### **Murabahah**

barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual, serta nasabah melengkapi persyaratan dalam transaksi jual beli.<sup>58</sup>

2. Lembaga akan melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana lembaga sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
3. Atas dasar akad jual beli yang telah dilakukan oleh lembaga dengan nasabah, maka lembaga akan membeli barang ke *supplier*/penjual sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang di dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah lembaga.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada lembaga, lazimnya pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur.<sup>59</sup>

### C. Manajemen Risiko

## 1. Pengertian Manajemen Risiko

Setiap bidang yang berhubungan dengan bisnis pasti akan berhadapan dengan yang namanya risiko, begitu pula dengan lembaga keuangan syariah juga akan menanggung risiko di dalam operasionalnya

<sup>58</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

<sup>59</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 139-140.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya ketidakpastian pada peristiwa tersebut.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Philip Best menyatakan “bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik langsung maupun tidak langsung.”<sup>62</sup>

Risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) risiko pasif, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya, dan b) risiko responsif, yaitu risiko yang munculnya memiliki penjelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2010).











1. *Normal Loss Expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri.
2. *Probable Maximum Loss*, kerugian bila pengaman tidak berfungsi.
3. *Maximum Foreseeable Loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri.
4. *Maximum Possible Loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

Setelah melakukan analisis dan evaluasi, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko. Hal ini memerlukan pengelolaan yang berbeda pula sesuai dengan risiko yang dihadapi. Pada umumnya risiko dapat dikelola dengan melakukan:

- <sup>74</sup>Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 260.



- d. Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan makasaat telah ditanda tangani maka barang tersebut adalah nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai risiko yang terjadi di dalam pembiayaan *murābahah* terdapat banyak sekali yang harus diantisipasi oleh lembaga keuangan syariah. Tetapi yang sering terjadi di dalam pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan, di mana nasabah lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran. Risiko pembiayaan adalah risiko kredit yang diderita lembaga, terkait dengan kemungkinan bahwa pada jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban kewajibannya kepada lembaga. Sedangkan menurut Tampubolon

Pengukuran risiko pembiayaan (risiko pembiayaan) dapat diketahui dengan NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan berisiko. Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Standar kriteria yang ditetapkan Kementerian Koperasi bahwa rasio pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi 5%.<sup>79</sup> Jadi lembaga yang bisa dikatakan sehat atau dapat mengendalikan risiko pembiayaan dalam operasionalnya tidak lebih dari 5%.

<sup>79</sup>PERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi , Pasal 10.

## 1. Sejarah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

[illegible]

menanggung beban bunga dan denda apabila pembayarannya tidak tepat waktu sesuai yang telah disepakati.<sup>80</sup>

Dengan kondisi demikian, maka tertantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan danapenggerak dalam bentuk simpanan pokok sebagai modal awal operasional Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera.

Pendirian Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera mulai nampak sejak bulan Februari<sup>45</sup> ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan hukum No: 109/BH/XVI.37/2008.

Pada saat pendirian KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang beralamatkan di Jln. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya dengan mengumpulkan modal dan sejumlah anggota sebanyak 20 orang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengkoperasian dengan modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 173.350.000,-.<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 13 September 2017.

<sup>81</sup>Subchan Bashori, *Wawancara*, 15 September 2017.

Selain itu terdapat perubahan jenis koperasi yang awalnya tentang koperasi jasa berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang sebelumnya **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)** menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**.

Visi yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah “Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi koperasi yang syar’i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah.”

1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jati diri koperasi.



- 2) Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah.
- 3) Membudayakan bermuamalah secara syar'i.
- 4) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa.

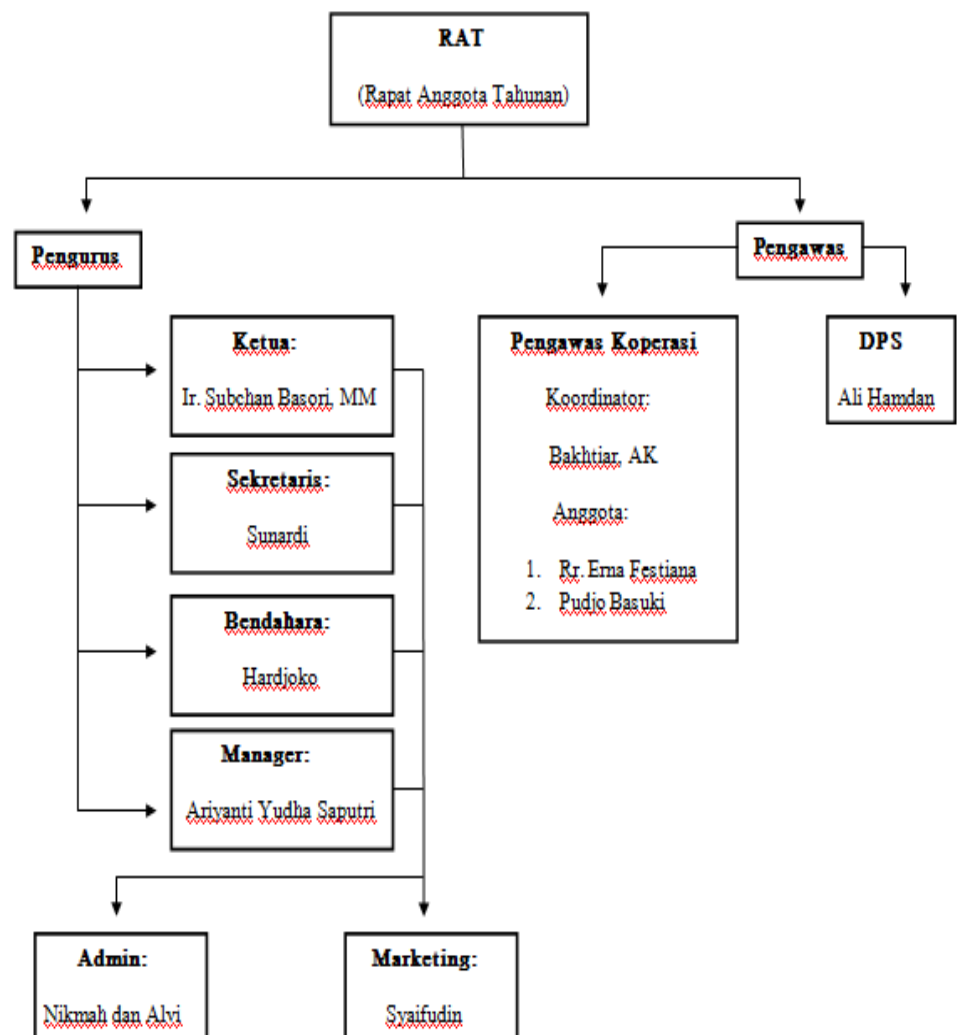
Motto KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera: **“Muamalah Berkah Sejahtera adalah solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan amanah.”**<sup>82</sup>

### 3. Struktur Organisasi dan Diskripsi Tugas

Dalam suatu organisasi atau lembaga, dibutuhkan orang-orang untuk menjalankan operasional yang ada di dalamnya, berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera**

<sup>82</sup>KSPPS MBS, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus* (Surabaya: KSPPS MBS, 2016), 5.



*Sumber: dokumentasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera*

Dari gambar di atas terlihat untuk pengelolaan dan pengaturan jalannya operasional di KSPPS Muamalah berkah sejahtera dibutuhkan orang-orang yang dipilih berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan), seperti pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, manajer, admin, dan marketing. Dan pengawas yang terdiri dari DPS (Dewan Pengawaa Syariah), dan pengawas koperasi.

a. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

### b. Pengawas Koperasi

c. Ketua

d. Sekretaris

<sup>85</sup>Ibid., 115.

Sekretaris bertugas untuk menyusun rancangan program kerja untuk ke depannya, mengatur, memantau, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional koperasi.<sup>86</sup>

e. Bendahara

Bendahara bertugas untuk mengadminitrasikan seluruh kegiatan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana koperasi dan bertanggung jawab atas keamanan aliran kas koperasi.

f. Manajer

Tugas dari seorang manajer adalah melaksanakan kebijakan, merencanakan, mengelola, dan menentukan target dan sasaran penghimpunan dana, serta melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan di dalam operasional koperasi.<sup>87</sup>

g. Admin

Seorang admin memiliki tugas yaitu menerima dan memvalidasi transaksi, menyusun laporan keuangan harian dan pendapatan keuangan harian.<sup>88</sup>

#### h. Marketing

<sup>86</sup>Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.

<sup>87</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 116.

<sup>88</sup>Ibid., 117.



2. Simpanan wajib, yakni sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besar simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib ini jika anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
3. Simpanan sukarela, yakni simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad *wadi'ah yaqḍamanah* di mana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.
4. Simpanan berjangka, yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu pada perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota menggunakan akad *mudārahah muṭlaqah* yang artinya



Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni menverifikasi dan menganalisis permohonan pembiayaan. Jika permohonan tersebut sudah disetujui sesuai dengan besarnya pengajuan atau kurang dari pengajuan maka akan dijelaskan saat berlangsungnya akad. Selain itu, margin KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan tercantum dalam perjanjian tersebut.<sup>94</sup>

- <sup>94</sup>Syaifudin, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.

<sup>95</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

<sup>96</sup>Ibid., 149.









1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dimana pihak koperasi akan memperpanjang periode atau jangka waktu bagi anggota untuk membayar angsurannya, sehingga beban angsuran setiap bulan semakin ringan.
2. *Restructuring* (persyaratan kembali), yaitu memberikan keringanan pembayaran angsuran terhadap anggota dengan mengubah jumlah nominal yang harus dibayar tiap bulan, hal ini dilihat dari kondisi anggota, apabila anggota tersebut dianggap tidak mampu membayar angsuran setiap bulan dengan jumlah nominal yang disetujui pada awal akad.
3. Pelelangan barang jaminan, hal ini dilakukan oleh pihak koperasi apabila pembiayaan dianggap benar-benar macet (telah melampaui 9 bulan) dan tidak mungkin lagi anggota untuk membayarnya. Sehingga jaminan (agunan) milik anggota akan dilelang untuk membayar sisa angsuran pembayaran.

<sup>100</sup>Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.













**Tabel 3.4**  
**Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Penerima Kotak**  
**Penagihan**

No	Nomor Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu (bulan)
1	510101591	Rp 15.000.000,-	24
2	510101782	Rp 5.000.000,-	15
3	510101900	Rp 2.000.000,-	12
4	510101926	Rp 3.000.000,-	12
5	510101723	Rp 10.000.000,-	36
6	510101818	Rp 8.500.000,-	20
7	510101915	Rp 2.500.000,-	24
8	510102165	Rp 5.000.000,-	15
9	510102157	Rp1.000.000,-	12
10	510101953	Rp 5.000.000,-	12
11	510101982	Rp 7.000.000,-	20
12	510102027	Rp 7.000.000,-	12
13	510102195	Rp 1.000.000,-	12
14	510101841	Rp 10.000.000,-	30
15	510102217	Rp 4.000.000,-	24
16	510102020	Rp 5.000.000,-	12
17	510102073	Rp 5.000.000,-	18
18	510101910	Rp 9.000.000,-	36
19	510102094	Rp 12.000.000,-	24
20	510102092	Rp 22.000.000,-	18

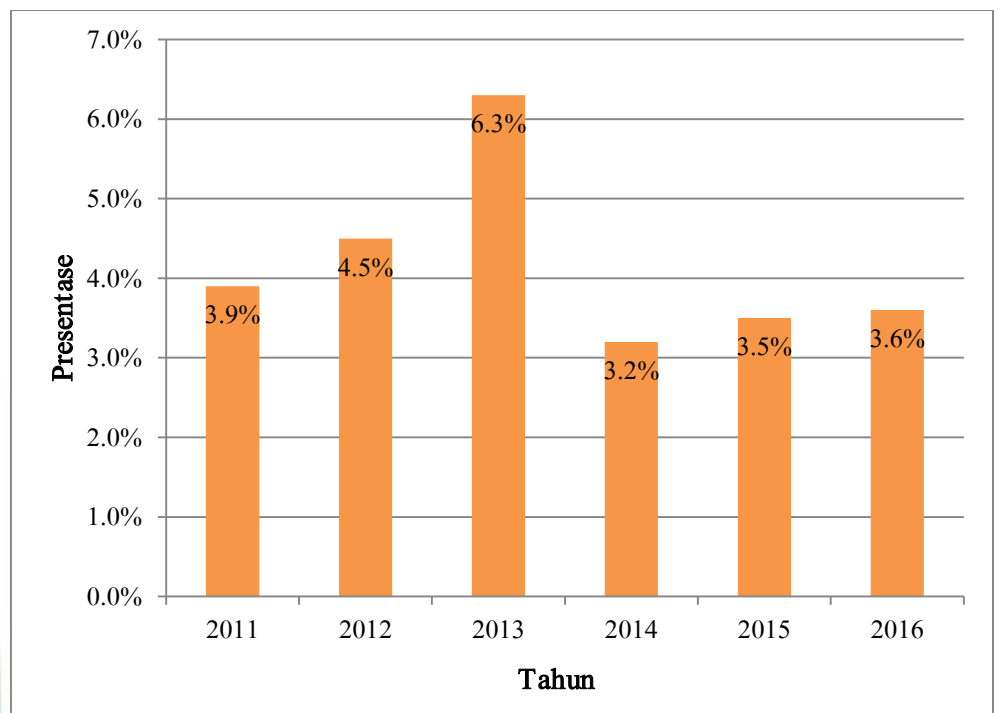
*Sumber: data sekunder diolah tahun 2017*

Tabel di atas menunjukkan data anggota koperasi yang menerima kotak penagihan dengan jumlah pembiayaan tertentu dan jangka waktu angsurannya. Sebagian besar anggota koperasi yang menerima kotak penagihan tersebut berprofesi sebagai pedagang yang artinya anggota yang memiliki pendapatan harian.<sup>103</sup>

### C. Tingkat Penggunaan Kotak Penagihan pada Pembiayaan *Murābahah*

<sup>103</sup>Syaifudin, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2017.





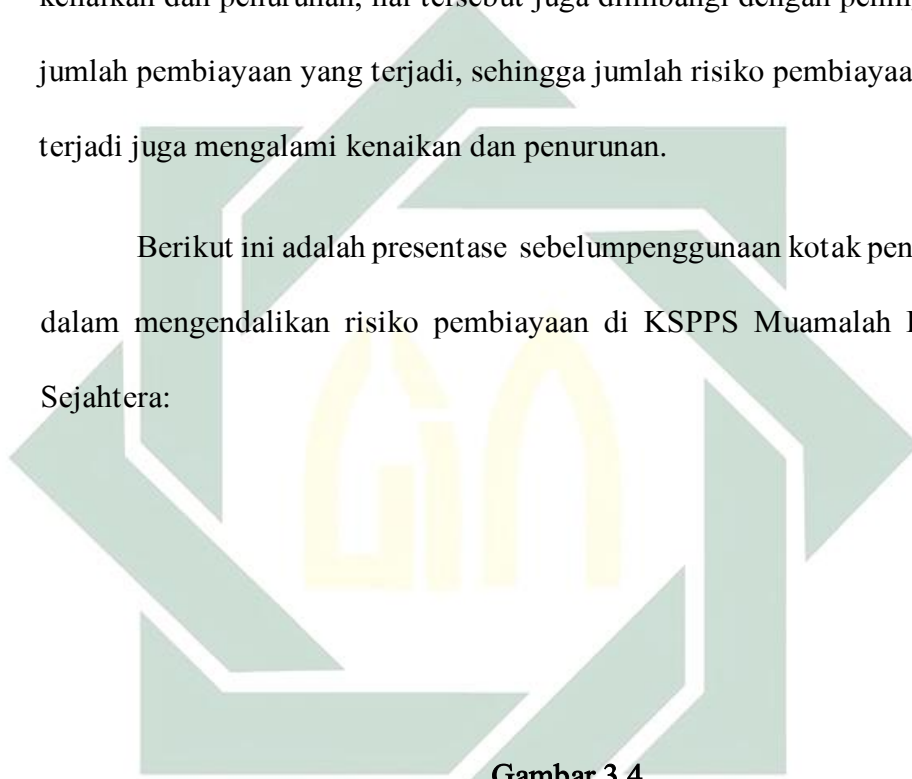
*Sumber: laporan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tahun 2011-2016*

Berdasarkan grafik di atas, terlihat presentase risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dari tahun 2011 sampai 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2011 sampai 2013 terus mengalami peningkatan hingga melebihi batas NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan berisiko yang ditetapkan di Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016, bahwa rasio pembiayaan bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi 5%. Terlihat risiko pembiayaan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,3%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 sebesar 3,2%.



Data di atas adalah data pembiayaan yang ada di dalam operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menunjukkan total pembiayaan yang terjadi dari bulan Januari 2017-Juni 2017 serta total pembiayaan yang bermasalah. Terlihat pada total pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dan penurunan, hal tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang terjadi, sehingga jumlah risiko pembiayaan yang terjadi juga mengalami kenaikan dan penurunan.

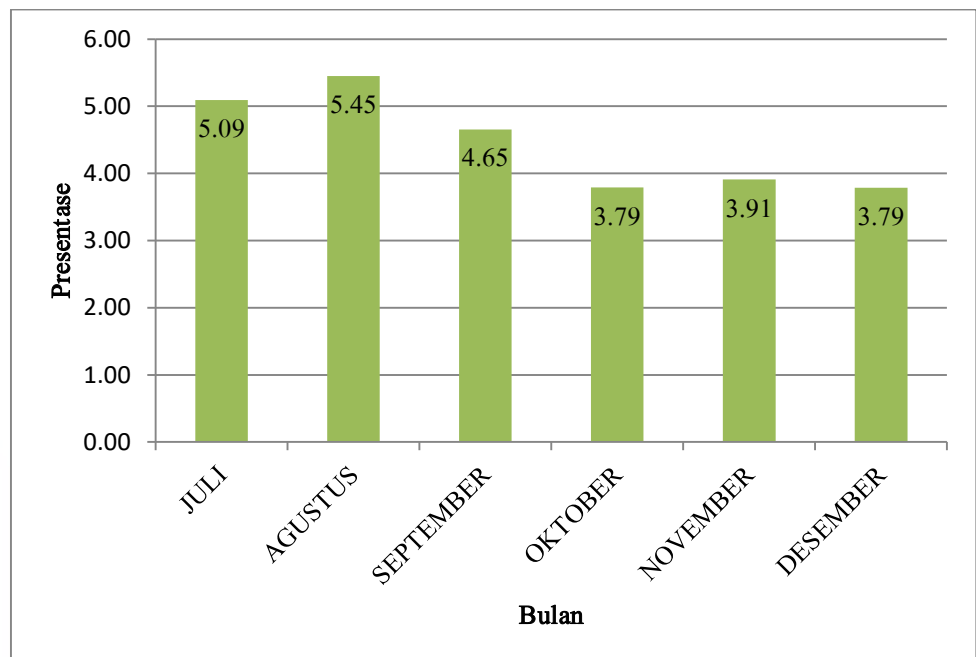
Berikut ini adalah presentase sebelum penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:



**Gambar 3.4**  
**Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah**  
**Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017-Juni 2017 Sebelum**  
**Menggunakan Kotak Penagihan**







*Sumber: data sekunder diolah tahun 2017*

Dari data grafik di atas merupakan tingkat presentase risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setelah menggunakan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan. Terlihat dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tingkat risiko pembiayaan terus menerus mengalami penurunan hingga di bawah 5%. Meskipun pada bulan Juni dan bulan Juli masih di atas 5%, tetapi di bulan selanjutnya sampai terus bulan Desember terus mengalami penurunan yang cukup t

## BAB IV

**ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI  
KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA**

<sup>107</sup>Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.





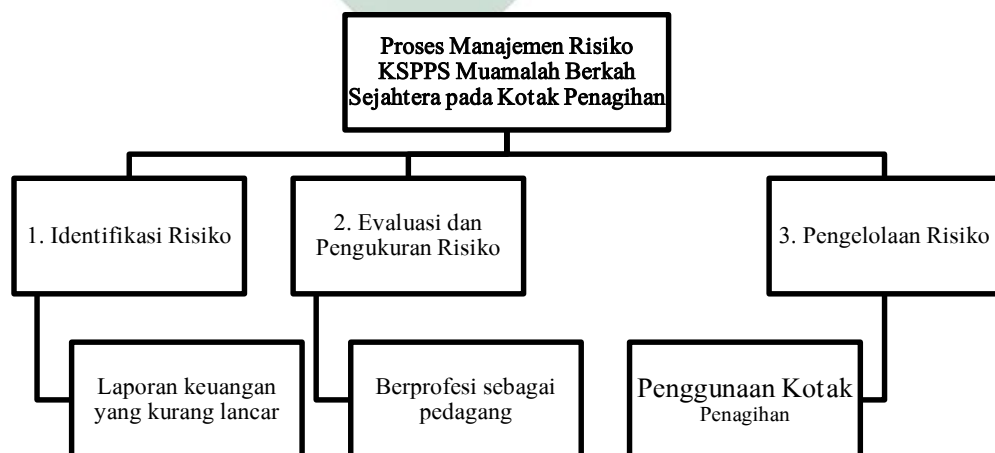




3. Pelelangan barang jaminan, apabila anggota dianggap benar-benar tidak dapat lagi membayar kepada koperasi, sehingga barang jaminan anggota akan dilelang untuk membayar sisa pembayaran di koperasi.

Berdasarkan manajemen risiko yang diterapkan di koperasi tersebut, ternyata pihak koperasi belum merasa puas dengan menggunakan 3 cara untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dihadapi terutama anggota yang berprofesi sebagai pedagang yang berpendapatan harian, sehingga menggunakan kotak penagihan sebagai salah satu manajemen risiko yang diterapkan oleh koperasi yang mulai diterapkan sejak bulan Juni 2017. Tetapi pemberian kotak tidak sembarangan dilakukan oleh koperasi. Berikut kerangka proses manajemen risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada kotak penagihan:

**Gambar 4.2**  
**Proses Manajemen Risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada**  
**Kotak Penagihan**



Keterangan:

## 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh koperasi dengan menganalisis dari data angsuran anggota yang kurang lancar berdasarkan laporan keuangan, yaitu anggota yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan.

## 2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Dalam evaluasi dan pengukuran risiko, koperasi mengutamakan anggota yang benar-benar bermasalah dan sebagian besar anggota yang bermasalah berprofesi sebagai pedagang. Karena pendapatan mereka yang harian dan kebanyakan pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan daripada membayar angsuran ke koperasi, sehingga memiliki potensi risiko pembiayaan.

### 3. Pengelolaan Risiko

Setelah koperasi melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengukuran risiko, maka selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Koperasi akan menggunakan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murābahah* apabila anggota yang bermasalah terutama untuk anggota yang berprofesi sebagai pedagang.

Setelah mengetahui data-data anggota yang berhak menerima kotak penagihan, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah dengan teknis penggunaan kotak penagihan pada pembiayaan *murabahah*. Berikut teknis penggunaan kotak penagihan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:











5. Pendanaan risiko adalah suatu kegiatan untuk mengalokasikan dana koperasi sebagai kompensasi dan cadangan jika risiko benar-benar terjadi.

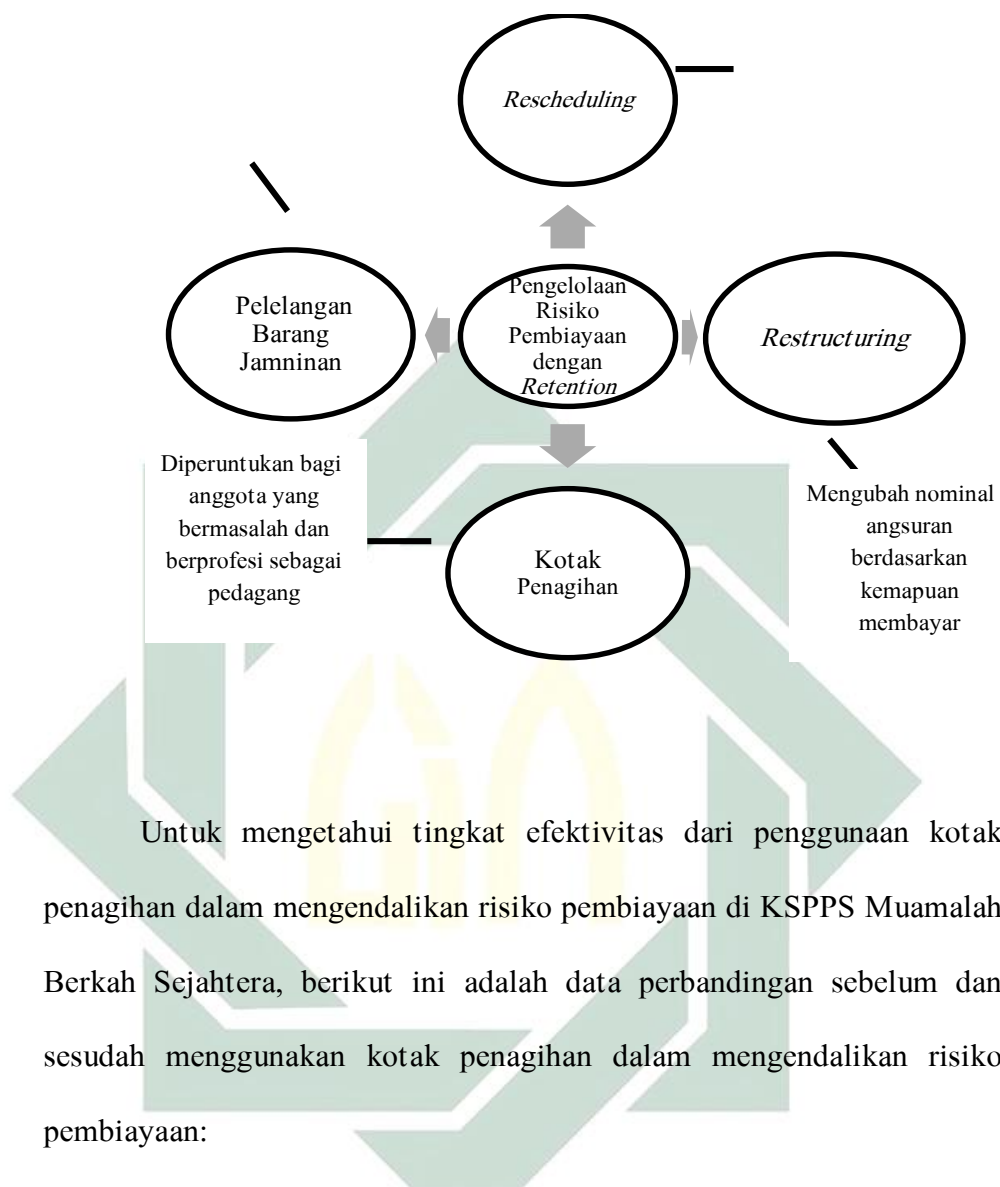
Pada pengelolaan risiko yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, pelepasan barang jaminan, dan kotak penagihan.<sup>119</sup> Dalam pengelolaan risiko yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu dengan melakukan *retention* (menahan risiko), artinya bahwa koperasi mampu mengelola risiko yang dihadapi itu sendiri tanpa bantuan pihak lain. Terbukti dari berbagai cara yang telah dilakukan koperasi dalam manajemen risikonya dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* salah satunya dengan menggunakan kotak penagihan.

**Gambar 4.5**  
**Pengelolaan Risiko dengan Cara *Retention* diKSPPS Muamalah**  
**Berkah Sejahtera**

Anggota yang mengalami  
macet dan telah  
melampaui lebih dari 9  
bulan

Penjadwalan  
kembali periode  
pembayaran  
(tunggakan 3  
bulan)

<sup>119</sup>Syaifudin, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2017.

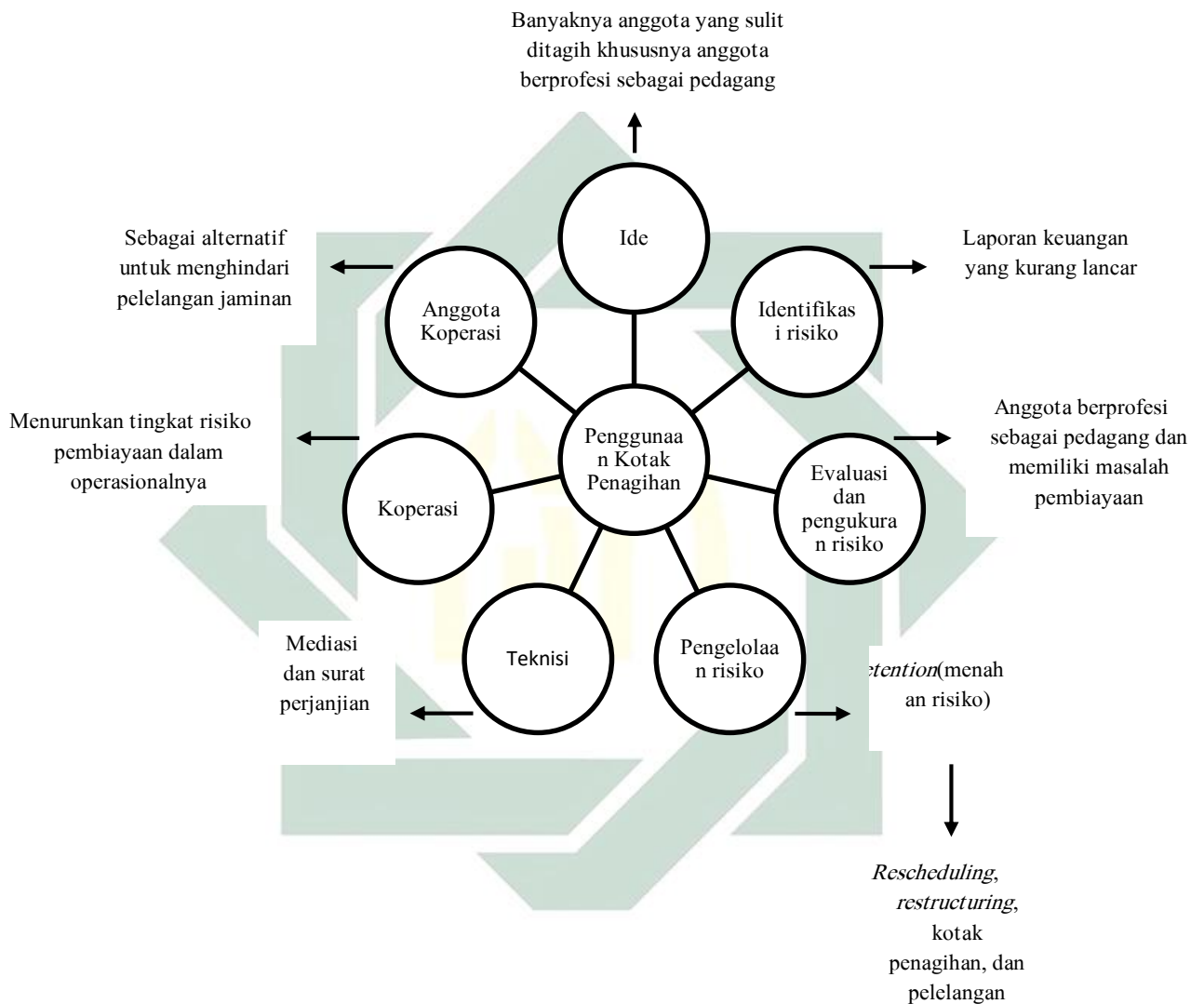


**Gambar 4.6**  
**Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kotak**  
**Penagihan Dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan di KSPPS**  
**Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2017**





**Gambar 4.8**  
**Skema Penggunaan Kotak Penagihan di KSPPS Muamalah Berkah**  
**Sejahtera**





1. Penggunaan kotak penagihan merupakan salah model yang digunakan di dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS Mumalah Berkah Sejahtera dalam mengendalikan risiko pembiayaan terutama anggota yang berpendapatan harian atau berprofesi sebagai pedagang. Berbagai cara telah dilakukan oleh koperasi dalam mengendalikan risiko pembiayaan seperti *rescheduling*, *restructuring*, dan pelelangan barang jaminan. Pada penggunaan kotak penagihan ini koperasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur anggota yang pantas diberikan kotak ini. Setelah itu, koperasi akan melakukan mediasi dan menyiapkan surat perjanjian kepada anggota sebagai bukti bahwa anggota bersedia menerima kotak tersebut.
2. Tingkat efektivitas dari penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam mengelola risiko koperasi melakukan *retention* (menahan risiko). Berdasarkan data yang diperoleh sebelum menggunakan kotak penagihan tingkat risiko pembiayaan mencapai diatas 5%, kemudian setelah menggunakan kotak penagihan tingkat risikonya menurun hingga mencapai 3,79%, hal ini sesuai dengan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Standar kriteria yang di <sup>86</sup>mentrian Koperasi bahwa



1. Bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, upaya untuk mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan kotak penagihan dalam manajemen risikonya diharapkan terus berkembang untuk ke depannya. Karena penggunaan kotak penagihan ini jarang ditemui di koperasi-koperasi lain dan dapat dijadikan referensi oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam mengendalikan risiko pembiayaan di dalam operasionalnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk penelitian berikutnya tentang manajemen risiko untuk mengendalikan risiko pembiayaan. Mengingat penggunaan kotak penagihan ini baru berjalan pada tahun 2017 dan banyak sekali hal-hal yang bisa diteliti dari sisi lain kotak penagihan ini.

[illegible]

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani).
- Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan". *Tsafaqah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010.
- Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.
- Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Jaya Sakti, 2006.
- Dewi, Roshila. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Faisal. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*. *Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 3, 2011.
- Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya: Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 15. No. 2, 2013.
- Hanafi, Mahmud M. 2009. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adi Warman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karyoto. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi, Konsep*. Yogyakarta : CV Andi Offset , 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mufid, Fathul. *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak*. *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nabilah, Sarah. *Analisis Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian: Studi Kasus BMT As Salam, Kramat, Demak*. Institut Pertanian Bogor.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. el-JIZYA. Vol. 4, No. 1, 2016.
- PBI No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 ayat 7.
- PERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal 10.
- PERMEN No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 ayat 17.
- Prastiwi, Juli. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing*. UIN Walisongo Semarang.
- Putra, Septa Priangga dkk. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat untuk Meminimalisir Risiko Kredit: Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang*. Jurnal Adminitrasi Bisnis. Vol. 26, No. 2, 2015.
- Ramadiyah, Rizki. *Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*. Jurnal Kewirausahaan. Vol. 13. No. 2, 2014.
- Rivai, Veitzhal dan Rifki Ismal. 2010. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Shobirin. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Iqtishadia. Vol. 9. No.2, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- [illegible]